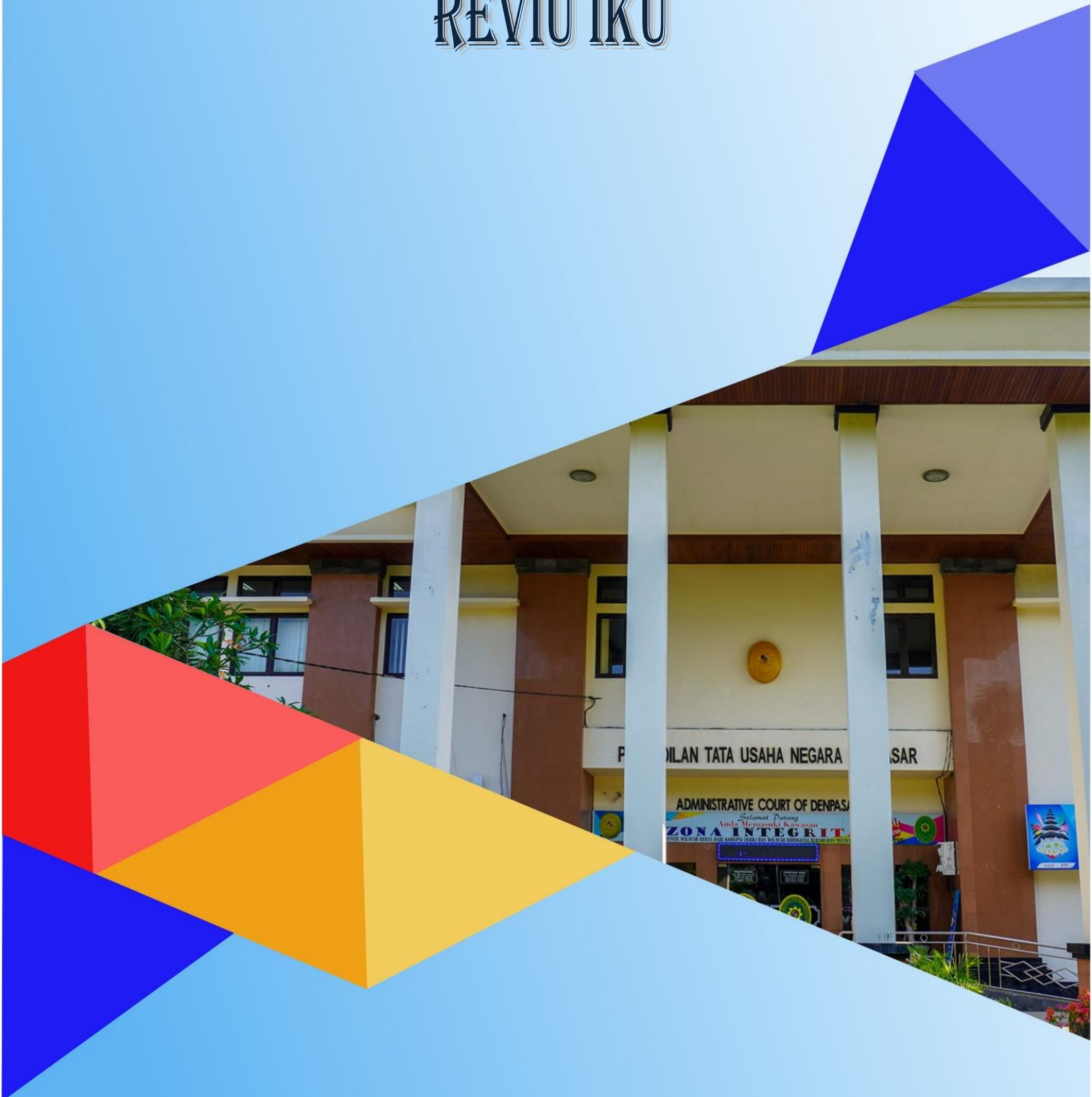




REVIU IKU



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 4 Denpasar
Telp. (0361) 236213, Email: info@ptun-denpasar.go.id
Website : www.ptun-denpasar.go.id

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	TARGET	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4(Empat Lingkungan Peradilan) • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5(Lima) Bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	90%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{7}{20} \times 100\% = 35\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	50%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p style="text-align: center;"> TRIWULAN I : 3,90 (97,50) TRIWULAN II : 3,76 (94,00) TRIWULAN III : 3,79 (94,75) TRIWULAN IV : 3,77 (94,25) </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	90%	Laporan Triwulan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Presentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. 	Panitera	100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{96}{96} \times 100\% = 100\%$$

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan hokum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hokum yang memerlukan layanan hokum.
- Jumlah layanan hokum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.
- Bagi Satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan.

Panitera

100%

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah Putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hokum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	100%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar



HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

SK TIM REVIU IKU



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
NOMOR : 127.1/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2024

TENTANG
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 711.2/KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ;

KEDUA : Menunjuk kembali yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2023;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reviu Indikator Kerja Utama (IKU) adalah menyusun Reviu Indikator Kerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Tahun 2024 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ;

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,




HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Di Mataram ;
2. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : /KPTUN.W7-TUN3/SK.HK1.2.5/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
- Ketua : Mohammad Zahid , S.H., M.H
Panitera Pengadilan Tata Usaha Denpasar
- Sekretaris : Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.M.
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Denpasar
- Anggota : 1. I Putu Suryadana, S.H (Panitera Muda Perkara) ;
2. I Nengah Wijana, S.H (Panitera Muda Hukum) ;
3. Putu Eka Aryawati, S.H (Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan) ;
4. Kadek Seri Budiyan, S.Pd (APK APBN Ahli Muda)
5. Ni Putu Juliartini, S.E (PK APBN Penyelia)
6. Desak Tri Wisnawati, S.T., S.H (PK APBN Penyelia)
7. Qamarullah, S.Sos (Penata Operasional Lainnya)

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO

